1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

   Pada Triwulan I Tahun 2026, perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting (Bapokting) di Kabupaten Lamongan secara umum berada dalam kondisi **relatif terkendali**, meskipun terdapat tekanan pada beberapa komoditas pangan strategis, terutama **cabai rawit**, yang mengalami kenaikan harga akibat faktor cuaca dan meningkatnya permintaan menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 H.

   Kondisi tersebut merupakan kelanjutan dari risiko yang telah teridentifikasi pada Triwulan IV Tahun 2025, ketika cabai rawit menjadi salah satu komoditas dengan volatilitas harga paling tinggi. Pada Triwulan I 2026, tekanan harga cabai kembali terjadi. Berdasarkan hasil pemantauan pasar pada awal Februari 2026, harga cabai rawit di Kabupaten Lamongan berada pada kisaran **Rp65.000–Rp80.000/kg**, sementara komoditas pangan strategis lainnya seperti beras, gula, MinyaKita, telur dan daging ayam relatif tersedia dan masih berada dalam rentang yang dapat dijangkau masyarakat.

   Hasil pemantauan pada Pasar Sidoharjo awal Februari menunjukkan harga beras premium sekitar Rp14.900/kg, beras medium Rp13.000–13.500/kg, beras SPHP Rp12.500/kg, gula pasir Rp16.000/kg, MinyaKita Rp15.700/liter, telur ayam ras sekitar Rp28.000–30.000/kg, dan daging ayam ras sekitar Rp38.000–40.000/kg. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar komoditas strategis masih relatif stabil, sementara cabai rawit menjadi komoditas yang memerlukan perhatian khusus.

   Memasuki periode Ramadan dan menjelang Idulfitri, tekanan permintaan terhadap bahan pangan meningkat. Namun demikian, melalui penguatan pemantauan harga dan pasokan serta pelaksanaan intervensi pasar, kondisi harga secara umum dapat dijaga agar tidak mengalami gejolak yang berlebihan.

   Pada Maret 2026, hasil pemantauan menunjukkan bahwa harga beberapa komoditas pangan mulai mengalami normalisasi. Secara nasional, harga beras medium pada Maret 2026 berada pada sekitar Rp13.681/kg, MinyaKita Rp15.890/liter, cabai merah keriting Rp40.943/kg dan cabai rawit merah Rp77.589/kg. Data tersebut memperlihatkan bahwa cabai rawit masih menjadi komoditas yang relatif tinggi dibandingkan komoditas pangan strategis lainnya.

   Dengan demikian, risiko utama pengendalian inflasi Kabupaten Lamongan pada Triwulan I 2026 masih berasal dari **volatilitas komoditas hortikultura, khususnya cabai rawit**, peningkatan permintaan pada momentum HBKN, faktor cuaca, serta ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Ketersediaan Pasokan

Kabupaten Lamongan bukan merupakan daerah utama penghasil cabai sehingga pasokan cabai rawit masih sangat bergantung pada daerah sentra produksi di luar Kabupaten Lamongan.

Curah hujan tinggi pada awal tahun turut memengaruhi produktivitas dan waktu panen cabai sehingga menyebabkan pasokan berkurang dan harga mengalami peningkatan. Kondisi serupa juga terjadi di berbagai daerah lain, dimana kenaikan harga cabai rawit dipengaruhi oleh faktor cuaca dan produktivitas petani.

Selain cabai, kebutuhan terhadap beras, telur, daging ayam, gula dan minyak goreng meningkat menjelang Ramadan dan Idulfitri sehingga diperlukan pengamanan stok lebih awal.

2. Keterjangkauan Harga

Kenaikan harga cabai rawit menjadi perhatian utama karena memiliki volatilitas yang tinggi dan berpotensi memengaruhi ekspektasi masyarakat.

Di sisi lain, beberapa komoditas strategis relatif terkendali. MinyaKita misalnya terpantau sekitar Rp15.700/liter dan beras medium sekitar Rp13.000–13.500/kg pada periode pemantauan Februari 2026.

3. Kelancaran Distribusi

Sebagian kebutuhan pangan Kabupaten Lamongan masih berasal dari luar daerah. Oleh karena itu, kelancaran arus distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga.

Risiko gangguan distribusi dapat meningkat pada periode permintaan tinggi, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri. Untuk itu diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah, distributor, Bulog, pelaku usaha dan daerah pemasok.

4. Komunikasi Efektif

Perubahan harga komoditas pangan yang cepat perlu diikuti dengan penyampaian informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat.

Pemantauan harga melalui **SIPULDABAPOK**, SISKAPERBAPO dan sumber informasi harga lainnya perlu terus diperkuat sebagai dasar *early warning system* TPID. SIPULDABAPOK sendiri merupakan sistem yang dikembangkan untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan data harga bahan pokok harian di Kabupaten Lamongan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan I Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama TPID melaksanakan pengendalian inflasi melalui strategi **4K**, yaitu:

1. Ketersediaan Pasokan

Upaya yang dilakukan antara lain:

- melakukan pemantauan ketersediaan Bapokting secara berkala;
- memastikan ketersediaan beras, gula, minyak goreng, telur, daging ayam dan komoditas strategis lainnya;
- memperkuat koordinasi dengan **Perum BULOG** dalam penyediaan beras SPHP;
- menjaga ketersediaan komoditas pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri;

melakukan pemantauan terhadap komoditas cabai rawit yang memiliki volatilitas tinggi;
- memperkuat koordinasi dengan daerah sentra produksi pangan untuk mengantisipasi kekurangan pasokan.

Pada awal Januari 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga melaksanakan pasar murah di Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan pada periode awal tahun.

2. Keterjangkauan Harga

Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan berbagai intervensi harga melalui:

- Operasi Pasar Murah;
- koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- fasilitasi pasokan bahan pangan dengan harga terjangkau;
- penyediaan beras SPHP;
- pengawasan harga Bapokting di pasar;
- pemantauan harga cabai rawit;
- serta pelaksanaan pasar murah menjelang Ramadan dan Idulfitri.

Operasi Pasar Murah Ramadan 2026 dilaksanakan secara maraton mulai **19 Februari sampai 10 Maret 2026** di berbagai lokasi, antara lain Pasar Sidoharjo, Alun-Alun Lamongan, Kecamatan Karanggeneng, Kembangbahu, Sugio, GOR Lamongan, Pucuk dan Babat. Komoditas yang disediakan meliputi beras, gula, minyak goreng, telur dan cabai.

Selain operasi pasar Kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga melaksanakan Operasi Pasar Murah di Kecamatan Sukodadi pada 4 Maret 2026. Dalam kegiatan tersebut beras SPHP dijual Rp55.000/5 kg, ayam Rp30.000/kg, gula Rp14.000/kg, MinyaKita Rp13.000/liter dan cabai rawit Rp40.000/kg.

Intervensi tersebut memberikan tambahan pasokan dengan harga di bawah harga pasar sehingga membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus meredam tekanan harga pada periode permintaan tinggi.

3. Kelancaran Distribusi

Dalam rangka menjaga kelancaran distribusi, TPID Kabupaten Lamongan melakukan:

1. pemantauan distribusi Bapokting dari produsen menuju pasar;
2. koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha;
3. penguatan kerja sama dengan BULOG;
4. pemantauan ketersediaan MinyaKita;
5. pengawasan distribusi beras SPHP;
6. koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
7. pemantauan pasar secara langsung untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan atau hambatan distribusi.

Hasil pemantauan Februari menunjukkan bahwa pasokan komoditas strategis di Pasar Sidoharjo relatif tersedia dan tidak ditemukan indikasi penimbunan.

4. Komunikasi Efektif

-

Komunikasi dan koordinasi dilakukan melalui:

- rapat koordinasi TPID;
- pemantauan harga harian;
- koordinasi antar-OPD;
- koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- koordinasi dengan BULOG;
- pemantauan pasar;
- penyampaian informasi harga kepada masyarakat;
- serta pemanfaatan data SIPULDABAPOK dan sistem pemantauan harga lainnya.

Strategi komunikasi diarahkan untuk memastikan bahwa setiap perubahan harga komoditas dapat segera diketahui dan direspons oleh TPID sehingga kebijakan intervensi dapat dilakukan sebelum terjadi gejolak yang lebih besar.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa strategi 4K telah berjalan secara relatif terintegrasi.

Dari aspek **ketersediaan pasokan**, stok komoditas pangan strategis secara umum dapat dipertahankan dalam kondisi aman. Permasalahan lebih menonjol terjadi pada komoditas cabai rawit yang dipengaruhi oleh faktor produksi dan cuaca.

Dari aspek **keterjangkauan harga**, pelaksanaan Operasi Pasar Murah yang dilakukan secara maraton selama Ramadan menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga harga dan daya beli masyarakat. Pelaksanaan intervensi di berbagai titik juga memungkinkan masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.

Dari aspek **kelancaran distribusi**, koordinasi dengan BULOG sub divre Bojonegoro, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, distributor dan pelaku usaha mampu mendukung ketersediaan komoditas strategis di pasar.

Sementara dari aspek **komunikasi efektif**, pemantauan harga secara berkala melalui sistem informasi harga serta pemantauan langsung di pasar telah menjadi dasar dalam menentukan langkah intervensi.

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperkuat, khususnya **pengendalian cabai rawit dari sisi hulu**, pengamanan pasokan sebelum periode HBKN, serta pengembangan mekanisme *early warning system* yang dapat menghubungkan perubahan harga dengan tindakan intervensi secara lebih cepat.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan evaluasi Triwulan I 2026, TPID Kabupaten Lamongan perlu mengarahkan kebijakan pengendalian inflasi pada beberapa langkah berikut:

1. Penguatan Produksi *Volatille Food* (Cabai)

Melanjutkan program pengembangan sentra cabai binaan dengan pendekatan **by name by location**, penyesuaian kalender tanam, penyediaan sarana produksi serta pengembangan urban farming sebagai *buffer supply*.

Hal ini sejalan dengan rekomendasi Triwulan IV 2025 yang menempatkan penguatan produksi hulu sebagai solusi struktural untuk mengurangi ketergantungan Lamongan terhadap pasokan cabai dari luar daerah.

2. Penguatan Kerjasama Antar Daerah

Memperkuat **KAD** dengan daerah surplus cabai dan komoditas pangan strategis lainnya, terutama sebelum memasuki periode permintaan tinggi.

Skema *off-taker agreement* dan *buffer supply* perlu mulai disiapkan lebih awal sehingga intervensi tidak hanya dilakukan ketika harga sudah melonjak.

3. Pengembangan *Early Warning Sistem*

Pemantauan harga harian perlu dikembangkan menjadi sistem peringatan dini dengan indikator yang jelas.

Sebagai contoh:

- kenaikan harga >10% dalam 7 hari → peningkatan monitoring;
- kenaikan >20% → persiapan intervensi pasar;
- kenaikan >40% → aktivasi KAD dan Operasi Pasar.

Pendekatan tersebut merupakan pengembangan dari rekomendasi Triwulan IV 2025 mengenai *early warning system* berbasis data harian.

4. Penguatan Operasi Pasar berbasis data

Operasi Pasar tidak hanya dilaksanakan berdasarkan kalender HBKN, tetapi juga berdasarkan hasil pemantauan disparitas harga dan risiko kenaikan harga.

5. Penguatan Peran BUMD (Perumda Pasar)

Perumda Pasar Kabupaten Lamongan dapat didorong untuk berperan sebagai **aggregator/off-taker** komoditas pangan strategis, khususnya cabai, sehingga pemerintah memiliki instrumen untuk mengamankan pasokan dan melakukan intervensi ketika terjadi gejolak harga.

6. Penguatan Komunikasi Publik

Data harga dan kebijakan pengendalian inflasi perlu disampaikan secara rutin dan mudah dipahami masyarakat untuk mencegah kepanikan pasar dan *panic buying*.

Kesimpulan :

Secara umum, **pengendalian inflasi Kabupaten Lamongan pada Triwulan I Tahun 2026**

berjalan relatif efektif, ditandai dengan terjaganya ketersediaan sebagian besar komoditas pangan strategis dan terlaksananya berbagai intervensi harga menjelang Ramadan dan Idulfitri.

Tekanan utama masih berasal dari **cabai rawit**, yang memiliki tingkat volatilitas tinggi dan dipengaruhi faktor cuaca serta ketergantungan pasokan dari luar daerah. Oleh karena itu, strategi pengendalian inflasi ke depan perlu bergeser dari pendekatan yang dominan bersifat reaktif menuju pendekatan yang lebih **preventif, berbasis data dan early warning**, melalui penguatan produksi, KAD, buffer stock, distribusi, operasi pasar terarah dan komunikasi publik.

Dengan konsistensi penerapan strategi **4K — Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif — TPID Kabupaten Lamongan diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, mengendalikan ekspektasi inflasi serta mempertahankan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.**